

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Design Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Desa "Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hery Susanto, dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR.*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Juniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Sekretariat, Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 221.

- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan “Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perundang-undangan “Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To Good Village Governance)*, UB Press, Malang, 2013.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah “Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan”*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ni'matul Huda dan Riri Nazriah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Purwo Santoso (Editor), *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Sadu Wisistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, 2006.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

SF. Marbun, dkk., *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012.

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

#### **B. Tesis**

Despan Heriansyah, *Pergeseran Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)*, Tesis, Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta, 2016.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Menguji Materil.

#### **D. Data Elektronik dan Internet**

Frangky Zachawerus, "*Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Perundang-undangan Di Indonesia*". Dalam [file:///C:/Users/USER/Downloads/S2-2014-339946-chapter5\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/S2-2014-339946-chapter5(3).pdf).

Gusti Partana Mandala, *Wewenang DPR Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tesis, Pascasarjana Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011. Dalam [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-176-891703856-cover.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-176-891703856-cover.pdf).

<http://bayuanggono.blogspot.co.id/2008/10/analisis-terhadap-kedudukan-peraturan.html>.

Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Peran Data Dan Informasi Dalam*

Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan, Disampaikan dalam Workshop “Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA)”, Jakarta, 23 Februari 2015.

Ni'matul Huda, *Desa dalam UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja*, Materi Matakuliah Hukum Pemerintahan Desa, 2014.

\_\_\_\_\_, *Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa*, Materi Matakuliah Hukum Pemerintahan Desa, 2014.

\_\_\_\_\_, *Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Materi Matakuliah Hukum Pemerintahan Desa, 2014.

\_\_\_\_\_, *Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Materi Matakuliah Hukum Pemerintahan Desa, 2014.

Nike K. Rumokoy, *Peran P.TUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, hlm. 9. Dalam <http://repo.unsrat.ac.id>.

Sri Sanituti Hariadi, *Sistem Hukum Di Indonesia*. Dalam [web.unair.ac.id/admin/file/f\\_20025\\_a13.ppt](http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_a13.ppt).

[www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran\\_i.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran_i.pdf).